

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ade Mamam Suherman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005. *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Malang : Bayumedia.
- Ahmad Syafiq, 2015. *Rekonstruksi Ideal Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Keadilan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, UNISSULA, Semarang.
- Andi Hamzah, 1985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita.
- _____, 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arif Awaludin, 2011. *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Penyimpang Korupsi (Studi Kasus Budaya Hukum Aparatur Sipil Negara Dalam Menyimpang Korupsi Birokrasi Di Jawa Tengah)*, Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, UNDIP, Semarang.
- Aziz Syamsuddin, 2011 *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghlmia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Penjara*, Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- _____, 2008. *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bismar Nasution, 2008. *Rejim Anti Money Loundering di Indonesia, Books Terrace &Library. Bandung.*
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001. *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Esmi Warassih, 2002. Tanpa Tahun, *Metode Penelitian Hukum*, Yayasan Dewi Sartika, Semarang.
- Evi Hartanti, 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika,.
- Darwan Prinst, 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana korupsi*,: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Dedy N. Hidayat, 2003. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
- D. Schaffmeister, sebagaimana dikutip I.G.M. Nurdjan, 2010. *Korupsi – Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso. 1990. *Peranan Pengawasan Dalam Penangkalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Ermansjah Djaja, 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika,.
- Evi Hartanti, 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efi Laila Kholis, 2010. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing. Jakarta.
- Frieda Husni Hasbullah, 2002. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, Jakarta: Ind-Hill Co.
- Hans Kelsen, 1971, *General Theory of Law and State* , New York : Russel and Russel.

- H. Zainuddin, 2014. *Kerangka, Dalil, Teoritis, Konseptual, dan Metode Penelitian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irdanul Achyar, 2010. *Analisis Pengimplementasian Rezim civil forfeiture dalam pemberantasan Money Laundering*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
- Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekjen dan Kemitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2006. *Theory & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Juniadi Soewrtojo, 1998, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Leden Marpaung. 1992. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, 2007. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Koentjaraningrat, 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Gramedia, Jakarta.
- Loebby Loqman, 1991. *Beberapa Ichwal di Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Datacom, Jakarta.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta.
- Mardalis, 1999. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 2012. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Sofmedia, Medan.
- Muchsin, 2006. *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Iblam, Jakarta.
- M. Nurul Irfan, 2016. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika Ofset, Amzah. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Purnawing M. Yanuar, 2007. *Pengembangan Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

- Roeslan Saleh, 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Rohim, 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Pena Multi Media. Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983. *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1982. *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- _____, 1983. *Masalah Penegakan Hukum* , Sinar Baru, Bandung.
- _____, 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Adtya, Bandung.
- _____, 1983. *Masalah Penegakan Hukum* , Sinar Baru, Bandung.
- Sholehuddin, 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2009. *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrume Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2010. *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sudarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Suratno, 2016. *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Sebagai Whistleblower Dan Justice Collaborators Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, UNISSULA, Semarang.
- Surachmi, Dr. Suhandi Cahaya, 2010. *Strategi & Teknik Korupsi* Sinar Grafika. Jakarta.
- Sutherland & Cressey (disadur oleh Sudjono D), 1974. *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung.
- Tampil Anshari Siregar, 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, 2016. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Cetakan Ke 4. Rajagrafindo Perkasa. Jakarta.
- _____, Arie Purnomosidi, 2014. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media. Bandung.
- _____, 2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa.
- _____, 2015. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kesatu, Nusa Media, Bandung.
- Theodorus M. Tuanakotta, 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat. Jakarta.
- Uber Silalahi, 1998. *Metode dan Metodologi Penelitian*, Bina Budaya, Bandung
- Wahyudi Hafiludin Sadeli, 2010, *“Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi”*, Jakarta: Tesis Pascasarjana.
- W. Friedman, 1999. *Teori dan Filsafat Umum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Yunus Husein, 2007. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Cetakan I*, Book Terrace & Library. Bandung.
- _____. 2019. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Pusat Studi

Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta.

Yudi Kristiana, 2017. *Teknik Penyidikan & Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media. Yogyakarta.

B. Makalah, Karya Ilmiah, Jurnal, Putusan dan Lain-lain

Attamimi, A Hamid.S. 1990. *Disertasi Judul Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita I V*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Anthony Kennedy, 2000. “*An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom*” *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 10, No. 1, Tahun 7.

_____, 2006. “*Designing a Civil Forfeiture System : An Issues List For Policymakers and Legislators*”, 13(2) *Journal of Financial Crime*.

Budiman Peranginangin, 2006. *Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Permintaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, Lokakarya “Criminal Keuangan”, ICITAP dan POLRI, 18 September. Bogor.

Nursidik, 2011. *Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim*, Dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi 74, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi KAK 2003 atau *UNCAC 2003*.

Ridwan Arifin, 2016. *Analisis Hukum Internasional Dalam Perampasan Aset Di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (Uncac) Dan Asean Mutual Legal Assistance Treaty (Amlat)*. Jurnal Penelitian Hukum Volume 3, Nomor 1, Maret, Halaman 37-55.

Salinan Putusan di website direktori Putusan Mahkamah Agung, Kasasi kasus Hendra Rahardja.

Uber Silalahi, 1998, *Metode dan Metodologi Penelitian*, Bina Budaya, Bandung.

Zulkarnain Sitompul, 2005. *“Merampas Hail Korupsi Tantangan Kerjasama Internasional”* Artikel dalam Jurnal Forum Keadilan, Nomor 40, Tanggal 13 Februari.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 Tentang Pencabutan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat (P4 AD) Prt/PERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mencabut UU No 24 Prp Tahun 1960.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban,

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan korban.

Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat (P4 AD) Prt/PERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda, dimuat dalam Berita Negara Nomor 40 tahun 1958 tanggal 15 April 1958.

United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes 2000

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003

D. Situs Internet

Nanda Narendra Putra, “Non-Conviction Based Asset Forfeiture untuk Buru Aset Pelaku Investasi Ilegal”, Hukumonline.com, 24 Mei 2017, diakses pada 24 Februari 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59251bbd52796/inon-conviction-based-asset-forfeiture-i-untuk-buru-aset-pelaku-investasi-ilegal>.

http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2015/02/25/1/a/lampiran_i.pdf, diakses pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2017, Pukul 13:19 Wib

<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/topik?kid=1&kategori=Jumlah-dan-Distribusi-Penduduk>.

<http://www.indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/geografi-indonesia>, diakses pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2017, Pukul 16:19 Wib.

<https://www.antaraneews.com/berita/489478/jutaan-mati-setiap-tahun-akibat-makanan-tak-aman>.

<http://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/fao-and-the-post-> , diakses pada hari Minggu tanggal 25 April 2018, Pukul 15:19 Wib

<http://www.depkes.go.id/article/print/17020200002/kementerian-kesehatan-ajak-masyarakat-cegah-dan-kendalikan-kanker.html>.

<https://ugm.ac.id/id/berita/1899-diskusi-eksaminasi-putusan-mahkamah-konstitusi-ri-no-003-puu-iv-2006>

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_31_99.htm

<http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2016/03/konsep-konsep-dalam-model-civil.html>

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=515784>

<http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>